



Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

Marselina Yunelcianta Bora^{1*}, Henrikus Herdi², Yan Yanitza Salvanos³

^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

*Korespondensi penulis: nelcybora@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the performance of the Village Government in Managing Village Fund Allocations in Nirangkliung Village, Nita District, Sikka Regency. This research design is qualitative descriptive with data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews. The type of data in this research is qualitative data with primary data sources and secondary data sources. Data analysis in this research takes the form of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the performance of the Village Government in Managing Village Fund Allocations is quite good, seen from several indicators, namely responsiveness, responsibility and accountability. However, there are two indicators that are not working well, namely productivity indicators and service quality. Therefore, the assessment of productivity and service quality in the Nirangkliung Village government must be improved. The preparation of activity programs must prioritize the programs contained in the Village Development Planning Conference as well as transparency from village government officials to the community in their accountability for managing Village Fund Allocations.*

Keywords: *Village Government Performance, Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, Accountability.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Rancangan penelitian ini adalah dekritif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, dilihat dari beberapa indikator yaitu responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Namun ada dua indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator produktivitas, dan Kualitas Layanan. Oleh karena itu, penilaian produktivitas dan kualitas pelayanan dipemerintahan Desa Nirangkliung harus ditingkatkan. Penyusunan program kegiatan harus memprioritaskan program yang tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa serta adanya transparansi aparat pemerintah desa kepada masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Kinerja Pemerintahan Desa, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Tanggungjawab, Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa akan mengalami kemajuan jika dalam pengelolaan keuangannya dikelola secara akuntabel dan transparasi.

Desa juga merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari Lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran pengelolaan alokasi dana dalam perencanaan pembangunan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat, MenurutI Wayan Saputra (2016).

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh karena kewenangan desa sudah ada sejak dahulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2008), otonomi desa menjadi sebuah harapan dan tantangan bagi pemerintahan desa serta masyarakat desa. Harapan dalam arti bahwa masyarakat desa dapat memberikan aspirasi dan contoh terhadap birokrasi pemerintah desa. Disisi lain, otonomi desa memberikan tantangan bagi pemerintahan desa dalam membuat kebijakan sesuai anggaran yang dimiliki. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus menjadi sebuah cermin harapan dan tuntunan masyarakat yang nantinya akan diwujudkan oleh pemerintah desa. Selain itu perencanaan dan penyusunan APBDes diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga tidak lagi masuk dalam kategori desa tertinggal, wewenang yang luas tetap diatur sesuai dengan undang-undang yang merupakan salah-satu aspek yang ikut berperan dalam pembangunan desa.

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun keuangan desa sendiri (Labolo, 2017). Oleh karena itu, pemerintahan desa memiliki peranan penting dalam penyusunan atau lebih tepatnya dalam pengelolaan aloksi dana desa tersebut. Seperti halnya beberapa desa di Kecamatan Nita mendapat Anggaran Dana Desa (DD) dari pemerintahan pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan Kabupaten Sikka. Alokasi Dana Desa ditujukan kepada desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi harus juga didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukan kinerja pemerintahan desa yang baik pula. Pengelolaan alokasi dana desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik.

Dalam peraturan pemerintah disebutkan adanya penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Penyerahan urusan dari kabupaten/ kota kepada desa, pengembangan rencana pembangunan partisipatif dan penataan wilayah desa.

ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dengan demikian keberadaan ADD tentunya sangat membantu dalam melaksanakan rencana pembangunan desa karena ADD adalah dana dialokasikan dan dikelola dalam melaksanakan kegiatan desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi, operasi pemerintahan Desa dan BPD (ATK, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan), belanja PKK, karang taruna, stanting. Sementara, analisis ADD dilakukan tiga bulansekali dalam setahun pada saat membuat laporan berkala yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan ADD.

Besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan ke desa membuat isu di kalangan masyarakat desa dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa memperhatikan sumber dananya. Pemerintahan desa harus memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merujuk pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang diharapkan untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka (Rivai *et.al*, 2011).

Konsep kinerja pada dasarnya dapat di lihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan.

Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Dewasa ini istilah kinerja telah menjadi perbincangan dikalangan para ilmuwan, birokrat, pengusaha dan mahasiswa serta masyarakat umum. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia merupakan prestasi atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005).

Berpijak dari hal tersebut, maka fokus utamanya adalah efektifitas penyaluran alokasi dana desa dan dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja pemerintahan birokrasi publik seperti, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responabilitas, dan Akuntabilitas.

Pembangunan desa mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa diimplementasikannya undang-undang desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber dana desa.

Pengelolaan dana desa yang diatur dalam undang-undang desa memicu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Undang-undang desa memberikan kewenangan dalam otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya, artinya apabila pemerintah desa memiliki kemampuan dalam menjalankan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini akan mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reski Wahdani (2021) Dengan judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Gowa menunjang bahwa kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Jonjo cukup baik dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud, karena aparat Desa Jonjo sangat patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dalam arahan kepala desa.

Penelitian Fitri (2015) dengan judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi bahwa belum berjalan dengan baik dari 5 indikator yang diteliti, 3 (tiga) indikator tidak berfungsi dengan baik seperti indikator produktivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas tetapi hanya (2) dua yang berfungsi dengan baik yaitu responsivitas dan responbilitas (Fitri, 2015).

Dari penelitian terdahulu diatas yang telah dilakukan pada masing-masing peneliti di daerah lain menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di Desa Jonjo menggunakan indikator kinerja birokrasi publik dikategorikan cukup baik sedangkan di Desa Vatunonju belum berjalan dengan baik. Sehingga alasan yang mendasari peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021) tersebut karena dari beberapa literatur kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Kinerja Pemeritahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

Berikut ini adalah rincian penggunaan Alokasi Dana Desadi Desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sejak 3 (Tiga) Tahun terakhir:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa

Tahun	Anggaran	Realisasi	Silpa
2021	583.115.094.00	583.115.094.00	0
2022	594.246.401.00	594.246.401.00	0
2023	352.493.040.00	352.493.040.00	0

Sumber: APBDes Desa Nirangkliung

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Pada tahun 2021 sebesar Rp. 583.115.094.000, untuk jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2022 sebesar Rp. 594.246.401.000 dan untuk jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2023 sebesar Rp. 352.493.040.000. Maka besaran jumlah pendapatan transfer dana ADD yang

diterima desa cukup besar dan meningkat pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar Rp.11.131.307. namun pada tahun 2023 pendapatan ADD berkurang dan hanya mendapat anggaran sebesar Rp. 352.493.040.000.

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, mengingat ADD yang diterima oleh desa untuk dua tahun sebelumnya dari tahun 2021 dan tahun 2022 jumlahnya cukup meningkat, dan pada tahun 2023 pendapatan ADD berkurang, namun pengelolaan anggaran ADD di desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka telah terealisasi dengan baik dan telah dievaluasi oleh dinas terkait di Kabupaten Sikka.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian tersebut berfokus pada kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Peneliti cukup mengetahui kondisi penelitian, serta peneliti telah melakukan observasi dan bertanya langsung dengan aparat desa tersebut. Berdasarkan observasi dengan aparat desa yakni di desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka masih terdapat kendala yang dihadapi selama ini adalah proses pencairan dana desa yang tidak sesuai dengan jadwal pencairannya, sehingga pihak desa mengalami keterlambatan pelaksanaan pembangunan di lapangan dan hal ini akan mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan evaluasi penggunaan dana desa, termasuk kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang ada dan kontrol dari pemerintahan dan masyarakat, Sehingga memunculkan kecemburuan sosial serta kecurigaan dari berbagai lapisan masyarakat desa akhirnya akan berdampak pada kinerja pemerintah desa, yakni dengan terlambatnya pengajuan dan pertanggung jawaban tentang dana desa. Maka dalam menyelenggarakan pemerintahan pengelolaan keuangan ADD dan DD, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi yaitu teori *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama (Donaldson, 1991).

Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yang berupa dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggungjawab atas setiap tindakannya, dan berlaku jujur terhadap semua pihak. *Stewardship theory* menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesannya. Kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas manajemen dan principal.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya disiapkan guna memberikan informasi dari hubungan *stewards* (pemerintah) dengan *principals* (masyarakat). Dikarenakan tuntutan akan kinerja pemerintah harus ditingkatkan sesuai dengan 5 (lima) tahap kinerja pemerintahan *Principals* akan semakin sulit menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan sendiri. Karena keterbatasan tersebut *principals* (masyarakat) mempercayai sumber daya yang mereka miliki kepada pihak yang dirasa *capable* yaitu *Stewards* (pemerintahan).

Implikasi *stewards theory* dalam penelitian ini adalah guna mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto, 2006) atau penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Djamar satori 2009). Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Kehadiran Peneliti

Dalam sebuah penelitian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangatlah penting karena untuk mendapatkan data yang lengkap. Tanpa kehadiran peneliti, maka penelitian tidak akan berjalan dengan lancar dan data pun tidak akan didapatkan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Jenis Data

Dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi tertulis bisa berupa pertanyaan, tanggapan, respon dan objek. Data kualitatif berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, sistem dan prosedur. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah (Husein Umar 2014).

Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J Moleong).

Teknik Pengumpulan Data

(Burhan Bungin 2025) Prosedur pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong).

b) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan

atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d) Pengamatan

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung pada responden penelitian dan juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan responden yang relevan dan berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif, Creswell dalam Semiawan dan Raco (2010) mendefinisikannya “sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral”. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema, gambar dan bukan angka-angka berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau dokumen resmi lainnya. Dalam analisis data kualitatif ini maka analisis datanya nanti akan lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian-uraian serta jarang sekali menggunakan data yang berupa angka-angka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita dalam pengelolaan Dana Desa cukup baik dilihat dari segi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal inilah yang harus ditingkatkan demi mencapai kinerja pemerintah Desa yang lebih baik di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah yang mengatur tugas dan fungsi pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari segi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas, kinerja pemerintahan desa Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita cukup baik. Hal ini dapat terwujud, karena aparat pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka sangat patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan Kepala Desa. Aparat Pemerintah Desa di Desa Nirangkliung, cukup respon terhadap tuntutan kerja yang selama ini dibebankan kepada semua aparat pemerintah desa di Desa Nirangkliung. Hanya saja, terdapatnya keterbatasan kualitas aparat yang kurang mendukung dalam meningkatkan kinerjanya. Untuk lebih dipahami dapat diuraikan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Produktivitas

Produktivitas: Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Produktivitas adalah bagian dari salah satu hal yang dijadikan untuk mengukur kinerja Perangkat Desa Di Nirangkliung Kecamatan Nita dalam pengelolaan alokasi dana desa. Secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.

Produktivitas merupakan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah Desa Di Desa Nirangkliung, dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat Desa. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Petrus Bruno Bajo (Kepala Desa Nirangkliung) pada tanggal 10 Juli 2020⁴ dan hampir sama dengan responden lain mengatakan bahwa:

pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik, namun ada kendala yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah: proses pencairan dana desa yang tidak sesuai dengan jadwal pencairannya, sehingga pihak desa mengalami keterlambatan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa sendiri dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri, dan juga terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak setuju sehingga mereka meminta ganti rugi apabila tanahnya dipakai sebagai alokasi dana desa. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Produktivitas pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita,

Kabupaten Sikka ini masih sangat rendah Karena Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat Desa Nirangliung. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Nirangliung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Namun hal ini produktivitasnya masih sangat rendah oleh karena itu, penting kiranya dilakukan perbaikan terhadap kinerja pemerintah Desa Nirangliung demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa Nirangliung

Sedangkan tanggapan yang disampaikan bapak Edison beliau mengatakan bahwa:

Produktivitas pegawai pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada kinerja pemerintah Desa Nirangkliung dan BPD jarang sekali dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, kecuali terdapat kendala baru BPD dilibatkan, ini yang membuat pengelola Alokasi Dana Desa belum efektif dan efisien, sehingga segala bentuk pelayanan dan pengurusan pengelolaan keuangan mengalami hambatan (10 Juli 2024).

Dari hasil penelitian terhadap beberapa informan diatas, maka produktivitas di pemerintah Desa Nirangkliung belum cukup baik atau belum sesuai dengan PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa sendiri dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri, dan terdapat juga anggota masyarakat yang tidak setuju sehingga mereka meminta ganti rugi apabila tanahnya dipakai sebagai alokasi dana desa. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam mewujudkan efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Produktivitas dipemerintah Desa Di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita ini masih sangat rendah, Karena pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat desa. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah desa di Desa Di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam mengukur produktivitas harus melalui tingkat efisien dan tingkat efektivitas yang baik dan harus memberikan pelayanan yang efektivitas dan efisien. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini aparat desa sangat

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka agar supaya pelayanannya dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat desa. Karena produktivitas ini merupakan salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

2) Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. (Ibrahim dalam Hardiyansyah, 2011).

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayan Publik. Hal ini seperti yang terjadi di pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di pemerintahan Desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas layanan yang dimiliki oleh pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Ini dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengukur kinerja pegawai pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan pegawai di pemerintahan di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kualitas pelayanan pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Seperti yang disampaikan Bapak Fransiskus Edison beliau mengatakan bahwa :

Baik ade kualitas pelayanan di Desa Nirangkliung ini belum maximal, kenapa dikatakan belum maximal, pertama dari faktor Aparat Desa itu sendiri, yakni dengan terlambatnya penyampaian laporan evaluasi pertanggung jawaban alokasi dana desa sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa pegawai sebagai aparat pemerintah Desa Nirangkliung ini menjadi lambat dan tidak professional dan terpercaya dalam menjalankan roda organisasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat khususnya masyarakat Desa Nirangkliung dalam pengelolaan alokasi dana desa dan kurangnya sikap rama tama dari aparat kepada masyarakat. Faktor penghambat yang kedua

adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga pihak Desa mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” (10 Juli 2024)

Sedangkan, menurut Ibu Sekertaris Desa Nirangkliung mengatakan bahwa:

Dipemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini belum mencapai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada pendidikan yang dimiliki serta pengalaman kerja pegawai pemerintah Desa yang lebih mementingkan urusan pribadi. Sehingga hal inilah yang membuat kinerja pegawai pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan alokasi dana desa karena faktor kualitas pelayanannya yang masih sangat terhitung rendah atau belum mencapai dari standar sesungguhnya.

Sedangkan tanggapan dari beberapa responden mengatakan bahwa aparat desa telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebaiknya pimpinan dalam hal ini Kepala Desa Desa Nirangkliung untuk lebih tegas dalam memimpin pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka guna mencapai kinerja organisasi pemerintahan yang baik dengan didukung oleh kualitas pelayanan yang baik pula, Sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini akan berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sikka yang melakukan urusan di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Maka dari itu, kualitas layanan harus ditingkatkan agar supaya kinerja Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini menjadi baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan yang dimiliki pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka itu sendiri.

Dengan demikian sumber daya manusia yang relatif rendah ini akan mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, sumberdaya manusia yang baik ini akan mendukung terhadap kinerja serta kualitas layanan yang akan baik pula bagi pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Maka tak heran kemudian ketika kualitas pelayanan ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pemerintah Kabupaten Sikka khususnya di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang merupakan fokus dari penelitian ini.

3) Responsivitas

Responsivitas adalah salah satu indikator kinerja organisasi publik yang menjadi fokus utama. Responsivitas (*responsiveness*) merupakan sebuah organisasi

dalam menyusun agenda- agenda yang diprioritaskan kearah pelayanan yang diharapkan masyarakat (Wahyu, 2020).

Responsivitas adalah kemampuan pegawai pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana responsivitas pegawai pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan (ADD), maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap Paham dan mengerti dengan tugas pemerintah Desa Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka tersebut. Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, faktor responsivitas aparatur menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam pelayanan terhadap masyarakat Desa. Seperti yang sampaikan oleh Bapak Petrus Bruno Bajo (Kepala Desa Nirangkliung) mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa Nirangkliung dalam mengenali keinginan masyakat desa serta mengetahui program yang harus dijadikan sebagai program prioritas dalam hal ini program yang menjadi prioritas adalah program PKK, Stanting dan ibu hamil. Dan hal inilah yang membuat pemerintah Desa Nirangkliung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan ADD menjadi mudah dalam pelaksanaannya. Karena semua program sudah diketahui dan ini akan memudahkan pegawai menyusun anggaran. (Wawancara 10 Juni 2024)

Faktor responsivitas kinerja aparat pemerintah Desa Nirangkliung dalam mengelolah administrasi serta keuangan di Kantor Desa Nirangkliung. Ini sangat

berpengaruh terhadap responsivitas yang dimiliki pegawai di pemerintah Desa Nirangkliung dalam sebuah instansi pemerintah desa. Oleh karena itu, reponsivitas dalam pemerintah Desa Nirangkliung sangat penting untuk ditingkatkan demi tercapainya kinerja pemerintah Desa Nirangkliung yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan menurut bapak Yulius mengatakan bahwa:

Respon Masyarakat terhadap dana desa yaitu pemerintahan harus Transparansi sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku (Wawancara, 10 Juli 2024)

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, responsivitas yang baik akan membuat kinerja pemerintahan desa lebih baik pula seperti pelaksanaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka supaya berjalan dengan baik walaupun mungkin didalamnya terdapat masalah seperti faktor kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan produktifitas dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Karena berjalan baiknya kinerja pemerintah Desa Nirangkliung, ini bergantung pada Kepala Desa masing-masing Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah. Oleh karena itu, responsivitas yang baik akan membuat kinerja akan lebih baik. Kemampuan Kepala Desa Nirangkliung dalam menjalankan roda organisasi ini menunjukkan pada faktor responsivitas yang baik. Sebab responsivitas yang baik ini akan memudahkan pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan bagaimana organisasi yang ada menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip Administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan dari organisasi tersebut (Tamaka, 2021).

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja pegawai di pemerintahan Desa

Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja pegawai di pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Maka peneliti mewawancarai informan ibu Rinel selaku kaur keuangan sebagai berikut:

Begini ade fungsi dalam Pengelolaan ADD pemerintah Desa Nirangkliung sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah Desa Nirangkliung. Kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Nirangkliung ini menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik. (wawancara, 10 Juli 2024)

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Nirangkliung dalam melaksanakan tugas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Responsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.

Sedangkan menurut ibu Gormina yanti:

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang udah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Nirangkliung dalam melaksanakan tugas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Responsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.

Hasil wawancara dari kedua informan diatas telah menunjukkan bahwa responsibilitas pelaksanaan tugas serta fungsi dari aparat pemerintah Desa Nirangkliung telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Faktor responsibilitas yang baik ini merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah Desa Nirangkliung tentunya akan baik sementara responsibilitas yang buruk ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah Desa Nirangkliung akan buruk pula.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah Desa Nirangkliung ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang di miliki aparat pegawai pemerintah Desa Nirangkliung peneliti mewawancarai informan sebagai berikut :

Aparat pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka sudah patuh terhadap aturan yang ada. Seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pemerintahan desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Oleh karena itu Akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan sebab akuntabilitas ini juga di dalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab sehingga faktor akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Nirangkliung dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan baik.

Pembahasan

Analisis kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

1) Produktivitas

Produktivitas: konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input).

Dari hasil penelitian terhadap beberapa informan diatas, maka produktivitas di pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka belum cukup baik atau belum sesuai dengan PREMENDAGRI 113 Tahun 2014 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa sendiri dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri dan terdapat juga anggota masyarakat yang tidak setuju sehingga mereka meminta ganti rugi apabila tanahnya di pakai sebagai alokasi dana desa. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Produktivitas di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini masih sangat rendah. Kerena pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat desa. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan desa di desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam mengukur produktivitas harus melalui tingkat efisien dan tingkat efektifitas yang baik dan harus memberikan pelayanan yang efektifitas dan efisien. Oleh karena itu pemerintah daalm hal ini aparat desa sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka agar supaya pelayanannya dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat desa. Kerena produktivitas ini merupakan salah-satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

2) Kualitas Layanan

Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai kepuasan kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah

dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa kinerja di pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam hal kuaitas pelayanan belum cukup baik, dikarenakan kualitas pelayanan pegawai di pemerintahan di desa nirangkliung dalam konteks fenomena birokrasi belum ada kesinabungan dalam pelayanan kepada masyarakat atau belum mencapai kualitas pelayanan yang baik. Sehingga hal ini yang membuat kinerja aparat pemerintahan desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini belum berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana desa karena faktor kualitas pelayanannya yang masih sangat terhitung rendah atau belum mencapai standar sesungguhnya. Pelayanan masih belum maksimal.

Dimana penilaian kualitas pelayanan ditentukan pada saat terjadinya pemberian terhadap masyarakat. Sesuai dengan penilaian kualitas pelayanan diatas maka kualitas pelayanan di desa nirangkliung, kecamatan nita, kabupaten sikka belum cukup baik. Oleh karena itu, kualitas layanan harus ditingkatkan supaya kinerja pemerintah desa nirangkliung, agar menjadi lebih baik.

3) Responsivitas

Responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana responsivitas Aparat Pemerintah Desa Di Desa Nirangkliung Dalam dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan ADD. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan Misi dan Tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian tentang Responvisitas di Desa Nirangkliung Dalam dapat dipahami bahwa sudah berjalan baik. Karena kemampuan aparat pemerintah desa di Desa Nirangkliung Dalam dalam mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Di Desa Nirangkliung.

Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana desa Di Desa Nirangkliung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

Reponsivitas ini sudah berjalan cukup baik hal ini terlihat pada kemampuan aparat pemerintah desa di Desa Nirangkliung. Dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah desa Desa Nirangkliung.

Dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas cukup baik. Diharapkan aparat pemerintah desa di Desa Nirangkliung dapat mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Nirangkliung.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Nirangkliung. ini menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian tentang Responsibilitas di Desa Nirangkliung. dapat dipahami bahwa sudah berjalan baik. Responsibilitas aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan ADD Di Desa Nirangkliung sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program pemerintah Desa Nirangkliung.

Pemerintah Desa Nirangkliung dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada prinsip yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu responsibilitas ini penting untuk tetap di jaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja di pemerintah desa di Desa Nirangkliung ini menjadi baik dalam pemberian pelayanan kepada publik.

Dapat disimpulkan bahwa indikator Responsibilitas sudah baik, karena sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Pemerintah Desa Nirangkliung dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada aturan yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik. Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah desa di Desa Kampung Dalam ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa Nirangkliung Dalam cukup optimal. Pemerintah Desa Nirangkliung sudah patuh terhadap aturan yang sudah ada, adapun usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Dalam mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Nirangkliung cukup optimal. Pemerintah Desa Nirangkliung Dalam sudah patuh terhadap aturan yang sudah ada, adapun usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Dalam mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu: Indikator produktivitas belum berjalan dengan baik, masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, Indikator kualitas pelayanan masih rendah, hal ini terlihat banyaknya usulan masyarakat yang tertuang dalam program desa tidak terkomodir dalam Rencana Kegiatan Anggaran Desa karena pemahaman yang berbeda dalam penyusunan program desa. Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipan dalam membangun desanya sendiri sudah cukup baik. Indikator responsibilitas terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa. Indikator akuntabilitas cukup optimal seperti usulan-usulan masyarakat yang di sampaikan di terima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggung jawab penuh terhadap dan wewenang yang ada sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pemerintah desa yang baik ini sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik. Indikator produktivitas belum berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa produktivitas pengelolaan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, sehingga penulis menyarankan bahwa: Penilaian produktivitas dan kualitas pelayanan di pemerintah desa Nirangkliung harus di tingkatkan. Bagi desa Nirangkliung diharapkan lebih efektif dan efisien serta harus disiplin terhadap waktu. Peneliti selanjutnya diharapkan sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara, karena jam kerja di desa adalah masih kurang efektif. Sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara terhadap pihak informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi penelitian praktis*. Teras.
- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.103.p28>
- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1-15.
- Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Studi pada alokasi dana desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1-15.
- Burhan Bungin. (2005). *Metodologi penelitian sosial: Format kuantitatif dan kualitatif*. Airlangga Universiti.
- Dekrita, Y. A., Wisang, I. V., & Uran, N. S. (2020). Wulanggintang Kabupaten Flores Timur Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Nipa Maumere. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(6), 52-62.
- Djaman Satori, & Komariah, R. (Eds.). (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Farida. (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1), 1-8.
- Fitri. (2019). Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 180-192.
- Henrikus Herdi, Emilianus Eo Kutu Goo, & Euprasius Mario Sanda. (2022). Analisis pelaksanaan tatakelola rencana strategis, akuntabilitas, dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Journal Accounting Unipa Maumere*, 1(1).
- Husein Umar. (2004). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- I Wayan Saputra. (2018). Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Indra Dwi Persada. (2016). Kinerja pemerintah desa dalam penggunaan dana desa (Suatu penelitian deskriptif tentang kinerja pemerintah desa dalam penggunaan dana desa tahun 2015 di Desa Margoagung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman). *Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata 1 (SI) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*.
- Kinanti, P. (2017). Kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3).

- Komariah, R. (Ed.). (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Lamandasa, S. R., & Ntada, S. (2022). Analisis kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan. *Jurnal Ekomen*, 20(2), 27-38.
- Lawelai, H. (2022). Analisis kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 26-38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1379>
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mega Elvira Maumcha Daud Liando, & Kairupan, J. (2017). Kinerja pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa (Suatu studi di Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 2-12.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang. *Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Reski Wahdani. (2021). Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. *Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja. (2008). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*. Rajawali Pers.